

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer : Interaksi hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*), PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hidajat, Imam, 2012, *Teori - Teori Politik*, Setara Press, Malang.
- Juniarso R dan Achmad S, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Suadi, Amran, 2018, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan kuliah; Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar grafika

Syarifudin, Ateng, 1992, *Pengurusan Perizinan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Aloysius, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2010, *Dasar - Dasar Sosiologi Hukum ( Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Winardi, 2007, *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*, CV. Mandar Maju, Bandung,

### **Makalah**

Rahmaniah, Aniek, “*Metateorizing : Teori konflik* (Ralf Dahrendorf)”, Departemen Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

### **Jurnal**

Daud Silalahi dan Kristianto P H, “Perizinan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Indonesia Pasca Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009”, *Law Review* Volume XI, No.1 Juli 2011, FH UPAD, Bandung; FH Unika Atma Jaya, Jakarta, 2011.

H, Arie Sukanti, “Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia ”, *Law Review* Volume X, No. 2 November 2010, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2010.

Hendrik Mezak, Meray, “Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Studi Perbandingan Konsepsi Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan”, *Law Review* Volume XI, No.1 Juli 2011, FH Universitas Pelita Harapan Karawaci, 2011.

### **Skripsi dan Tesis**

Angelina, Tiur, “Masyarakat Tambang Timah Inkonvensional Bangka Selatan Tahun 2003-2012”, *Skripsi*, Fakultas Sastra: Program Studi Sejarah, Universitas Sanatha Darma, Yogyakarta, 2018.

Ceneza, Dezeanty, “Pengawasan Terhadap Pertambangan Timah Rakyat Di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum: Program Hukum Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Sidabukke, Monang, “Penambangan Timah Tanpa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)”, *Tesis*, Fakultas Sains: Program Pascasarjana Studi Kajian Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, 2011.

### **Internet**

Anonim, 2018, “Pemerintah Tambah Tiga Kawasan Ekonomi Khusus Baru di 2019”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181227123136-92-356731/pemerintah-tambah-tiga-kawasan-ekonomi-khusus-baru-di-2019> diakses pada 1 september 2019 pukul 17.10 WIB

Anonim, “Luas Wilayah”, <https://www.bangka.go.id/?q=content/kecamatan-sungailiat> Dinkominfotik, Kabupaten Bangka

Darmansyah, 2019, “Mangkraknya Perda Zonasi Bangka Belitung”, <https://www.kompasiana.com/darmansyah24898/5d4321c9097f362dbf2c5be2/mangkraknya-perda-zonasi-bangka-belitung> diakses tanggal 10 September 2019 pukul 17.51 WIB

Ratna Sari, 2019, “Tolak Kapal Isap, Nelayan Rebo minta Alex bahas di Pusat”, [http://rri.co.id/sungailiat/post/berita/761814/daerah/tolak\\_kapal\\_isap\\_nelayan\\_rebo\\_minta\\_alex\\_bahas\\_di\\_pusat.html](http://rri.co.id/sungailiat/post/berita/761814/daerah/tolak_kapal_isap_nelayan_rebo_minta_alex_bahas_di_pusat.html) diakses tanggal 15 Januari 2020 pukul 20.55 WIB

Saturi, Sapariah, 2015, “Desak Moratorium Tambang Laut, Ribuan Nelayan Bangka akan Geruduk Kantor Gubernur”, <https://www.mongabay.co.id/2015/12/28/desak-moratorium-tambang-laut-ribuan-nelayan-bangka-akan-geruduk-kantor-gubernur/> diakses pada 1 september 2019 pukul 17.00 WIB

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Lembaran Negara RI Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara RI Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5490

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara RI Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5870

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara RI Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara RI Nomor 596.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara RI Nomor 295.